

MAKALAH PANCASILA
“PANCASILA DALAM LINTASAN SEJARAH INDONESIA”



Dosen Pengampu: Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM

Kelompok 1

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Hesty Winanda Sari | 041911333019 |
| 2. Lavenia Habibbah | 041911433132 |
| 3. Indah Lestari | 071911633007 |
| 4. Zabania Az Zahra Kusumayuri | 071911633014 |
| 5. Nur Afiah Nurulputri | 071911633077 |

MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pancasila dalam Lintasan Sejarah Indonesia” ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen kami, Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pancasila dalam lintasan sejarah indonesia bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM selaku dosen mata kuliah pancasila yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami ambil untuk semester ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan teman-teman kami yang telah memberikan segala dukungan, serta semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari, makalah yang kami susun ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Terima Kasih.

Surabaya, 29 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Perumusan Pancasila	4
2.2 Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	7
2.3 Nilai-Nilai Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia.....	9
2.3.1 Zaman Kutai	9
2.3.2 Zaman Sriwijaya	10
2.3.3 Zaman Kerajaan sebelum Majapahit.....	10
2.3.4 Zaman Majapahit.....	10
2.4 Peran Pancasila dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia	12
2.4.1 Islam	12
2.4.2 Nasakom.....	14
2.4.3 Komunisme	15
BAB III PENUTUP.....	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki dasar negara yang berbeda. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki nilai dan kultur budaya yang berbeda, tidak terkecuali Indonesia. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang diambil berdasarkan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Cikal bakal munculnya ideologi ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pancasila memiliki arti dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Adil dan Beradab, (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jika ditinjau dari segi sejarah kata pancasila berasal dari bahasa sansekerta, yaitu panca yang artinya lima, dan sila yang berarti asas atau dasar. Kata pancasila dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang dikenalkan oleh Mpu Tantular pada zaman majapahit.

Pancasila dirumuskan sebelum Indonesia merdeka oleh Panitia Sembilan yang merupakan bagian dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa kali sidang. Pancasila merupakan dasar resmi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945 karena pada saat itulah Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka.

Pancasila telah mengiringi dan menjadi pijakan bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Pancasila selalu menjadi rujukan dalam

setiap permasalahan bangsa. Misalnya, ketika terjadi pergolakan daerah di Indonesia, bangsa Indonesia selalu menjadikan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai sumber utama bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pun dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila selalu dijadikan sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, tidak berlebihan menyebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai. Hal ini dibuktikan dengan penerapan tiap silanya dalam segala aspek kehidupan.

Saat ini perkembangan dunia sangatlah cepat dan selalu membawa sebuah perubahan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, membutuhkan pondasi yang kuat untuk menghadapi hal tersebut. Di sini Pancasila memiliki peran dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan berpegang teguh pada Pancasila. Oleh karena itu, setiap insan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, harus mengetahui bagaimana Pancasila dapat terbentuk dan mengamalkannya nilainya dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila telah berjasa menjadikan bangsa kita utuh dan besar hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan pancasila sebagai dasar negara?
2. Mengapa Pancasila diangkat menjadi dasar negara Indonesia?
3. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia?
4. Bagaimana peran pancasila dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses perumusan pancasila sebagai dasar negara.
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan pancasila yang diangkat menjadi dasar negara Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan memahami peran pancasila dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia

1.4 Manfaat Penulisan

Setiap penulisan makalah dapat memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberikan motivasi dan inspirasi bagi setiap individu dalam rasa persatuan dan kesatuan bangsa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
3. Memberikan pemahaman tentang Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa.
4. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan dengan tema tentang kenegaraan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perumusan Pancasila

Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan penyelidik ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dengan adanya Badan Penyelidik ini Bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, yaitu dengan merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka.¹

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mendapat kesempatan pertama mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap BPUPKI yang pertama. Pidatonya berisikan lima asas dasar untuk Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut,

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Prof. Dr. Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 berpidato yang isinya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yaitu,

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusannya sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia

¹ Darji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila (Jakarta: Kurnia Esa, 1983), hlm. 35

2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Lima prinsip sebagai calon dasar negara yang telah disampaikan dalam pidato tersebut, oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Nama itu adalah atas saran salah seorang teman beliau yang merupakan seorang ahli bahasa.² Namun siapa ahli bahasa yang memberikan saran kepada Ir. Soekarno sampai dewasa ini belum ada yang mampu mengungkapkan.

Pancasila sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Sansekerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang juga dapat diartikan sebagai lima dasar terbentuknya negara. Istilah Pancasila ini juga termuat dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular.

Menurut Ir. Soekarno, kelima sila itu masih bisa diperas menjadi “Tri Sila” meliputi

1. Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesa dari “kebangsaan (nasionalisme) dengan peri kemanusiaan (internasionalisme)
2. Sosio Demokratis yang merupakan sintesa dari “mufakat” (demokrasi) dengan kesejahteraan sosial
3. Ketuhanan

Selanjutnya Ir. Soekarno juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila”, yang intinya adalah gotong royong.

Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan tokoh nasional dan disebut dengan Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI.

² Della Daya Wanti, “Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI”, Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 4

Setelah mengadakan pembahasan disusunlah sebuah Piagam yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut,

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila kemudian diterima oleh BPUPKI atas usul Ir. Soekarno dalam sidang kedua pada tanggal 14 Juli 1945 untuk dijadikan pembukaan di dalam hukum dasar yang sedang dirancang.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua oleh Drs. Mohammad Hatta. PPKI mulanya bertugas untuk memeriksa hasil-hasil BPUPKI, tetapi menurut sejarah, PPKI kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yaitu

1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia;
2. Sebagai pembentuk negara, (yang menyusun negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;)
3. Menurut teori hukum, badan seperti itu mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara yang fundamental).³

Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur, yaitu Sam Ratulangi dari Sulawesi, Hamidhan dari Kalimantan, I Ketut Pudja dari Nusa Tenggara, dan Latuharhary dari Maluku. Mereka semua keberatan dengan kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

³ Darmodiharjo, Op. Cit., hlm. 30

Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan dengan empat orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan.⁴ Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya di hari yang sama, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI terdiri dari dua bagian, yakni bagian Pembukaan dan bagian Batang tubuh UUD. Bagian Pembukaan yang terdiri atas empat alinea yang di dalamnya tercantum Pancasila yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan begitu, maka perumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar inilah yang merupakan perumusan yang resmi, yang tidak dapat diganggu gugat.

2.2 Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut *a basic norm* atau *Grundnorm*. Norma dasar ini merupakan norma

⁴ Fathurossi, “Kesaktian Pancasila dalam Membangun Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia”. NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018, hlm. 116

tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah.⁵

Pancasila merupakan identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama di Indonesia, sebab agama berperan dalam menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diwujudkan dalam sikap, tingkah laku, serta amal perbuatan, sehingga Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa karena nilai-nilai yang terkandung melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.⁶

Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh.⁷

Jiwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia mempunyai sifat statis (tidak dapat diganti atau diubah) dan sifat dinamis, sehingga menimbulkan cita-cita luhur bangsa. Di dalamnya tidak ada keberatan untuk menanamkan lima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila telah diterima sebagai dasar yang merupakan falsafah hidup bangsa kita.

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas, yaitu Pancasila adalah *Weltanschauung*, satu dasar falsafah. Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat untuk mempersatukan dalam perjuangan melawan imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan,

⁵ -, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Pancasila (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016), hlm. 80

⁶ Ibid., hlm. 64

⁷ Ibid., hlm. 83

perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain sebagainya.⁸

2.3 Nilai-Nilai Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai dalam pancasila telah ada sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum Bangsa Indonesia mendirikan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan implementasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Karena berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan.⁹

Pancasila merupakan implementasi dari nilai-nilai dan budaya asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan budaya tersebut merupakan warisan dari nenek moyang Bangsa Indonesia yakni berupa kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Indonesia memiliki banyak kerajaan, dan setiap kerajaan tersebut memiliki nilai, norma, serta sistem budaya yang baik dan beragam. Dari nilai dan budaya yang beragam tersebut menghasilkan banyak sejarah dan peninggalan-peninggalan yang tidak terlepas dari nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai pancasila dari berbagai kerajaan di Indonesia antara lain meliputi,

2.3.1 Zaman Kutai

Bangsa Indonesia masuk pada zaman ini pada tahun 400M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa tujuh tiang batu. Berdasarkan penemuan tersebut dapat diketahui raja yang memimpin yaitu Raja Mulawarman keturunan dari Raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Menurut prasasti tersebut Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada para Brahmana, sebagai tanda terima kasih para Brahmana membangun prasasti tiang batu (*yupa*) tersebut.

⁸ Ibid., hlm. 96

⁹ Centre for Strategic and Internasional Studies, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1976), hlm. 12

Pada zaman ini, masyarakat Kutai sudah menunjukkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam kehidupan kerajaan, seperti kenduri dan sedekah yang diberikan kepada orang lain. Jika lebih dipahami kembali makna dari kedua hal tersebut adalah menumbuhkan rasa damai, tentram, kebersamaan, kekeluargaan, dan kebahagiaan bersama.¹⁰

2.3.2 Zaman Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke VII di bawah kekuasaan wangsa Syailendra. Hal ini terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 683M dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa.¹¹ Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan yang besar dimana sistem pemerintahannya sangat tertata rapi sehingga mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyatnya. Tataan pemerintahan yang dibuat antara lain terdapat pegawai pengurus pajak, teknisi pembangunan gedung dan patung suci sehingga tidak lepas dari nilai ketuhanan.

2.3.3 Zaman Kerajaan sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai kerajaan yang mencangangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti.¹² Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Kalingga pada abad VII dan Kerajaan Sanjaya pada abad ke VIII. Pada periode kerajaan-kerajaan ini muncul beberapa puncak budaya antara lain terdapat Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada zaman ini lambang negara Indonesia terdapat makna yang melambangkan sila-sila pancasila, yang digambarkan dengan burung garuda dengan seloka *Bhinneka Tunggal Ika*. Kemudian di Wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula Kerajaan Singasari yang kemudian berhubungan erat dengan Kerajaan Majapahit.

2.3.4 Zaman Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. Berjalannya waktu, Kerajaan Majapahit menjadi daerah

¹⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010), hlm. 20

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., hlm. 21

yang rakyatnya memeluk agama Hindu dan Budha. Mereka hidup secara berdampingan dan damai. Pada masa majapahit pula kata Pancasila pertama kali dicetuskan, yakni dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang ditulis pada zaman kerajaan Majapahit pada abad ke 14. Nilai-nilai pancasila yang ada pada masa Kerajaan Majapahit antara lain,

Nilai sila pertama, terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat Sloka yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda.

Nilai sila kedua, terwujud pada hubungan baik Raja-raja Majapahit dengan Raja-raja di wilayah luar nusantara.

Nilai sila ketiga, berupa cita-cita persatuan nusantara. Khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331. Keutuhan negara tersebut mencerminkan sila ketiga pancasila, yakni persatuan indonesia.¹³

Nilai sila keempat, terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat, yakni penasehat Raja seperti Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yang berarti memberikan nasehat kepada Raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama.

Nilai sila kelima, terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menurut catatan pedagang Tiongkok bernama Wang Ta-Yuan, komoditas ekspor Jawa pada zaman Majapahit meliputi lada, kain, garam dan burung kakak tua. Sementara barang yang diimpor atau didatangkan seperti emas, mutiara, perak, keramik, sutra dan barang dari bahan besi. Ada dua faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur. Pertama, terdapat daerah berupa tanah subur yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian tanaman padi, yakni di lembah sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa

¹³ Ibid., hlm. 22

Timur. Faktor kedua adalah adanya pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa yang memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit. Pelabuhan tersebut merupakan tempat berkumpulnya komoditas rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Adanya pelabuhan rempah-rempah tersebut merupakan sumber pemasukan Majapahit, yakni dari pajak. Dalam kitab Negara kertagama disebutkan bahwa banyak pedagang asing berkumpul di pelabuhan tersebut, seperti dari China, India, Khmer, dan Siam. Pajak dikenakan kepada pedagang asing yang melakukan transaksi perdagangan, maupun yang menetap semi permanen.

Pajak merupakan sumber pemasukan penting bagi kerajaan Majapahit. Untuk itu, Majapahit memiliki pejabat sendiri dalam hal mengurus para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah kerajaan. Sehingga dengan kedua faktor tersebut, menjadikan Kerajaan Majapahit beserta rakyatnya menjadi makmur, dan menimbulkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyatnya.

2.4 Peran Pancasila dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia

Dalam perjalanannya, walaupun Pancasila adalah cermin dari jati diri bangsa, pancasila tidak serta merta mudah diterima oleh seluruh kalangan. Ada golongan tertentu yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain yang dirasa lebih sesuai dan menguntungkan bagi golongannya sendiri. Berikut adalah beberapa ideologi yang pernah hampir menggantikan Pancasila,

2.4.1 Islam

Pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya, Kartosuwiryo beserta kawan seperjuangannya seperti Raden Oni dan Kamran mengadakan suatu konferensi yang berhasil membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).¹⁴

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi menyebabkan Gerakan Sosial memiliki kesempatan untuk berkembang. Pada awalnya, DI/TII dicetuskan di Jawa Barat namun diikuti oleh Sulawesi Selatan dan kemudian diikuti oleh Aceh.

¹⁴ Reno Aprilia Dwijayanto, "Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo (1948-1962)". Risalah, Vol 3, No 12, Desember 2016, hlm. 1

Negara Islam Indonesia (NII), Tentara Islam Indonesia (TII) atau biasa disebut dengan Darul Islam (DI) adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada 7 Agustus 1949 oleh politisi muslim yang radikal yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawilgar, Kawedaaan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.¹⁵ Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar negara. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh berbagai motif yaitu menjadikan Islam sebagai prinsip dasar kehidupan kenegaraan. Namun, tidak menghasilkan titik temu antara kelompok gerakan ini dengan pemerintah Indonesia sehingga muncul niatan untuk mendirikan Negara Islam. Dari sini mulai muncul berbagai gerakan keagamaan yang semakin kompleks.

Pada Juli 1947 saat Belanda melakukan serangan terhadap berbagai wilayah Jawa Barat dan ketika kali pertama Kartosoewirjo sebagai ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di Jawa Barat, Kartosoewirjo mengubah Masyumi di wilayah ini menjadi gerakan perlawanan yang bertujuan membentuk negara Islam dan pada tahap inilah Kartosoewirjo memiliki pemikiran lebih jauh akan kebebasan, kemerdekaan, dan masa depan Indonesia sebagai negara-bangsa hanya dapat terjamin jika berdasarkan Islam dan syariah.

Kartosoewirjo dengan NII-nya merupakan satu-satunya gerakan bersenjata terkuat yang pernah ada di kawasan nusantara dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Gerakan Kartosoewirjo dan NII/DI dianggap sebagai ungkapan murni Islam politik yang bertujuan membentuk negara federasi Islam Indonesia dengan menumbangkan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.¹⁶

Kartosoewirjo saat itu memiliki corak ideologi politik Islam yaitu anti penjajahan dan pada saat yang sama menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan ke depan. Termasuk mengkritik keras berbagai kebijakan pemerintah

¹⁵ Patahuiddin Nur Aisyah dan H. M. Rasyid Ridha, "*Baraka: Basis Pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan (1953-1965)*", *Pattingalloang*, Vol. 5 No. 2 April-Juni 2018, hlm. 50

¹⁶ Azyumardi Azra, "Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang", *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 178

Belanda, ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan Belanda, dan ketidaknetralan kebijakan keagamaan dan politik Belanda. Bagi Kartosoewirjo tidak ada pilihan lain kecuali Islam dalam dimensi Internasional dari perjuangan Islam dan kaum Muslim untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.¹⁷

Setelah Kartosoewirjo memproklamasikan NII pada 7 Agustus 1949, barulah pada 1953 pemerintah RI menyatakan NII/DI sebagai musuh negara. Selanjutnya pada 1958-1959, TNI dikerahkan besar-besaran untuk menumpasnya.

2.4.2 Nasakom

Nasionalis, Agama, dan Komunis atau yang kemudian disingkat Nasakom merupakan murni hasil pemikiran dari Soekarno.¹⁸ Nasakom sendiri sebenarnya telah dicetuskan oleh Soekarno pada tahun 1926 dengan nama Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Soekarno mengungkapkan bahwa Pancasila dapat dikerucutkan menjadi Tri Sila yang mana memiliki korelasi dengan Nasakom. Apabila dijabarkan, isi dari Tri Sila yaitu,

- 1) Sosio Nasionalisme, mewakili nasionalis dalam Nasakom
- 2) Sosio Demokratis, mewakili komunis dalam Nasakom
- 3) Ketuhanan, mewakili agama dalam Nasakom

Masa demokrasi terpimpin dijadikan Presiden Soekarno untuk pemantapan Nasakom guna mempertahankan posisinya dari partai oposisi yakni Masyumi dan PSI serta TNI AD yang mungkin bisa menggoyahkan kekuasaannya. Pada saat itu, penguatan Nasakom juga dilakukan Soekarno untuk melindungi kawan politiknya, yakni PKI dari pihak-pihak yang berbeda ideologinya. Indoktrinasi konsep Nasakom mulai dilakukan dari tahun 1960-1965. Sampai tahun 1965 pula Presiden Soekarno melakukan kader kilat Nasakom. Proses indoktrinasi Nasakom tidak diterima dengan baik khususnya oleh TNI AD. Penyisipan konsep Nasakom membuat hubungan yang tidak baik antara PKI dan Angkatan Darat.

¹⁷ Ibid., hlm. 179

¹⁸ Lingga Winata dan Sri Mastuti Purwaningsih, "*Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965*", AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 3, Oktober 2017, hlm. 734

Perseteruan berpuncak pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Peristiwa ini membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Soekarno dan hilang pula lah konsep Nasakom yang diusung Soekarno. Nasakom yang diusulkan oleh Presiden Soekarno sangatlah bertentangan dengan pancasila dan NKRI. Komunis mengajarkan tentang atheisme, sementara hal ini sangat bertentangan dengan sila pertama pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

2.4.3 Komunisme

Komunisme adalah paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh Negara.¹⁹ Penyebaran komunis di Indonesia yang paling masif dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai pecahan dari Sarekat Islam (SI), PKI memiliki massa yang cukup besar. PKI juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tujuan perjuangan PKI adalah mewujudkan masyarakat komunis di Indonesia.²⁰ Namun, sejak gagalnya pergolakan rakyat melawan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926-1927, kegiatan PKI tidak muncul kembali.²¹ Dalam persiapan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, serta selama Perang Kemerdekaan 1945-1949, PKI juga tidak pernah ikut serta. Bahkan kehadirannya kemudian lebih banyak merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia.²²

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959, setiap partai politik harus berasaskan Pancasila. Hasil penilaian Panitia Tiga Menteri, Jenderal TNI A.H. Nasution, Ipik Gandarmana, dan Dr. H. Roeslan Abdulgani, dapat disimpulkan bahwa PKI mempunyai tujuan lain, baik secara politis maupun ideologis. Sekadar untuk menegakkan eksistensinya,

¹⁹ -, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunisme>), diakses pada 1 Februari 2020

²⁰ -, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar belakang, aksi, dan penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), hlm. 13

²¹ Ibid., hlm. 14

²² Ibid., hlm. 15

mula-mula PKI menyatakan menerima UUD 1945 dan Pancasila. Tetapi dalam perkembangannya, PKI mencoba menampilkan interpretasinya sendiri tentang Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila hanyalah alat pemersatu, sedangkan tujuan akhir PKI adalah mewujudkan masyarakat komunis di Indonesia.²³ Dalam ceramah D. N. Aidit di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi bulan Oktober 1964 yang dimaksud dengan Pancasila sebagai alat pemersatu yaitu, apabila Indonesia telah bersatu maka Pancasila tidak perlu ada lagi, karena tujuan dari Pancasila telah tercapai yaitu sebagai alat pemersatu.²⁴

Pada tahun 1954-1965, PKI menyusun strategi subversi (menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang) yaitu dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) tahun 1954 yang bertujuan untuk menyebarkan pengaruh PKI, menetralisasi lawan-lawan politik, serta menyiapkan dukungan yang luas di kalangan rakyat Indonesia terhadap program-program PKI. PKI juga melakukan manipulasi terhadap pidato-pidato kenegaraan Soekarno pada tiap tanggal 17 Agustus sejak tahun 1960 hingga 1965. Maksud dari memanipulasi di sini yaitu memanfaatkan isi pidato Soekarno agar seolah-olah mendukung dan sesuai dengan tujuan PKI. Selain itu, PKI melakukan penyusupan ke dalam ABRI, jajaran aparaturnegara lainnya, ke dalam partai politik, dan organisasi massa.

Gerakan 30 September 1965 adalah puncak kekacauan yang dilakukan oleh PKI. Dikatakan demikian karena pada saat itu pemberontakan yang dilakukan hampir dapat mengelabui rakyat Indonesia untuk membelokkan dan keluar dari ideologi Pancasila. Gerakan ini oleh CC PKI dirancang seolah-olah sebagai pergolakan di dalam tubuh TNI-AD. Peristiwa ini juga menewaskan Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI S. Parman, Mayjen TNI Haryono M. T., Brigjen TNI Sutojo S., Brigjen TNI D.I. Pandjaitan, serta anak dan ajudan Jendral TNI A.H. Nasution, Ade Irma Suryani dan Lettu Czi. Pierre Andreas Tendean.

²³ Ibid., hlm. 32

²⁴ Ibid., hlm. 33

Salah satu tindakan politik yang merupakan tindak lanjut dari Gerakan 30 September adalah memaksa presiden Soekarno mengambil berbagai keputusan politik yang akan membawa PKI ke dalam kekuasaan politik.²⁵ Namun, perkembangan yang terjadi pada 1 Oktober 1965 ternyata tidak sesuai dengan rencana Gerakan 30 September

Terjadinya Gerakan 30 September/PKI telah mendorong MPRS bersidang untuk mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terbebas dari ancaman paham komunisme.²⁶ Pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan No. XXV/MPRS/1966 yang berisi tentang pembubaran partai komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme.

Hasil pertarungan ideologis dan perbedaan sikap dalam menghadapi perkembangan secara internal elit politik Indonesia pastinya mengakibatkan politik Indonesia terus berguncang. Sejak Republik Indonesia merdeka (Agustus 1945), kemudian atas kompromi dengan Belanda menjadi RIS (Desember 1949), dan akhirnya kembali menjadi NKRI (Agustus 1950). Hal tersebut telah membuktikan bahwa kedudukan ideologi Pancasila yang dianut negara Indonesia merupakan ideologi sakti dan ideologi yang paling mencerminkan Bangsa Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.

²⁵ Ibid., hlm. 116

²⁶ Ibid., hlm. 152

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, serta pandangan hidup bangsa yang dirumuskan dari nilai-nilai luhur milik bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang sangat cocok bagi Indonesia yang memiliki keragaman yang luar biasa. Meskipun demikian, perjalanan pancasila sebagai ideologi bangsa tidak serta merta mudah diterima oleh semua kalangan.

Terdapat beberapa gerakan dari beberapa golongan yang ingin mengganti pancasila menjadi ideologi lain sesuai dengan keinginan golongannya. Namun, usaha-usaha tersebut selalu gagal dikarenakan seluruh elemen negara Indonesia masih berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan dasar ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jiwa nasionalis dan patriotis menghargai Pancasila dan sejarah dibalikinya yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia juga menjadi faktor yang mendukung abadinya Pancasila. Selain itu, kedudukan hukum pancasila merupakan norma dasar dan hukum dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga kedudukan pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi lain.

3.2 Saran

Setelah pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pancasila adalah satu hal mendasar yang penting bagi keutuhan Indonesia. Tiap individu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai serta amanah dalam Pancasila. Tidak melulu soal pendidikan Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahasiswa adalah generasi muda, ujung tombak perubahan. Penting bagi generasi muda untuk meningkatkan jiwa nasionalisme agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan luhur bangsa Indonesia. Hal sederhana yang dapat dilakukan salah satunya dengan mendasari pola pikir dengan Pancasila. Dengan demikian,

segala langkah dan keputusan yang hendak diambil tidak akan lepas dari nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah juga diharapkan memberi perhatian lebih terhadap penerapan Pancasila di masyarakat luas. Contohnya melalui bidang pendidikan. Pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis Pancasila agar warga negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang baik sejak dini. Sebab, sangat disayangkan apabila ideologi negara mengalami masalah, yang kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat tidak memiliki pegangan yang kuat terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila.

Pengamalan nilai-nilai pancasila hendaknya diterapkan secara utuh oleh masyarakat indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, mampu membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Dengan penerapan nilai-nilai pancasila maka kita dapat meminimalisasi konflik perbedaaan dan menyatukan bangsa indonesia dalam kesatuan yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (-, - -). Dipetik Februari 1, 2020, dari Entri: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunisme>
- Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar belakang, aksi, dan penumpasannya*. (1994). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Pancasila*. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Aisyah, P. N., & Ridha, H. R. (2018). Baraka: Basis Pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan (1953-1965). *Pattingalloang*, 50.
- Azra, A. (2014). Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang. *Studi Dinamika*, 178.
- Centre for Strategic and Internasional Studies. (1976). *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
- Darmodihardjo, D. d. (1983). *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Dwijayanto, R. A. (2016). Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo (1948-1962). *Risalah*, 1.
- Fathurossi. (2018). Kesaktian Pancasila dalam Membangun Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia. *NIZHAM*, 116.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Wanti, D. D. (2016). *Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Winata, L., & Purwaningsih, S. M. (2017). Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. *AVATARA*, 734.